



Kesbangpol DIY Gelar Workshop Pendidikan Politik Strategi Mewujudkan Pemilu yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa



Lawan Hoax, Eko Suwanto Ingatkan Pemilu yang Bermartabat dan Berbudaya

YOGYA,TRIBUN - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar Workshop Pendidikan Politik bertemakan Strategi Mewujudkan Pemilu tahun 2024 yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Workshop itu dimaksudkan untuk persiapan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 2024.

Tampil sebagai salah satu pembicara, Ketua Komisi ADPRD DIY, Eko Suwanto.

Politisi muda ini mengatakan, pemilu merupakan mekanisme demokrasi dan mekanisme konstitusional di dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat.

Demokrasi dalam Pancasila menawarkan akomodasi terhadap kearifan lokalnya. Maka, cara memilih pemimpin di Indonesia berbeda-beda.

Sebagai contoh di DIY, orang yang memimpin pemerintah di tingkat kecamatan atau Mantri tidak melalui Pemilu. Akan tetapi harus memiliki syarat sebagai aparatur sipil negara. Begitu pula dengan pimpinan pemerintah tingkat kelurahan atau Panewu.

"Namun, Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY tidak menggunakan Pemilu. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta," ujarnya.

Pasalnya UU tersebut menjadi konstitusi yang melindungi serta mengatur Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan landasan hukum dapat mengatur wilayahnya.

"Maka, cara memilih pemimpin dalam Demokrasi Pancasila kita ini sangat menghormati kearifan lokal," ucap Eko.

Kendati demikian, di DIY, untuk pemilihan pemimpin pemerintah tingkat Kabupaten/Kota dan Presiden serta Wakil Presiden RI melalui Pemilu.

"Berdasarkan ideologi Pancasila dan penghormatan atas kearifan lokal itu maka di DIY telah sesuai bahwa Pemilu harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa," jelasnya.

Di sisi lain, ia turut mengingatkan, selama proses Pemilu berlangsung bisa menerapkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia.



"Maka dari itu dibutuhkan peran juga tugas dan tanggung jawab dari KPU dan Bawaslu," imbuhnya.

Ia berharap Komisi Pemilihan Umum bisa bertanggung jawab menjamin hak konstitusional warga negara untuk menggunakan haknya dipilih dan memilih sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal itu tentu demi mewujudkan Pemilu yang bermartabat dan Berbudaya," tegas Eko.

Sementara itu, Sub Koordinator Pendidikan Politik Kesbangpol DIY, Sih Utami, mengatakan, pada persiapan Pemilu tersebut ada banyak hal yang harus dilakukan. Baik itu strategi maupun upaya dalam meningkatkan Pemilu 2024.

"Tentu kami harapkan, Pemilu itu bisa diimbangi dengan integritas, berkualitas dan tentunya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mengedepankan kesatuan bangsa," kata Utami saat memberikan sambutan Workshop Pendidikan Politik di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial pada Jumat (4/11).

Tidak hanya itu saja, pihaknya turut berharap Pemilu 2024 bisa memberikan warna dalam kemajuan bangsa yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan Workshop Pendidikan Politik, pihaknya mengundang beberapa perangkat organisasi pemerintahan daerah baik dari tingkat Kemantren Umbulharjo hingga perangkat pemerintah Kota Yogyakarta.

Oleh karenanya, ia pun berharap beberapa perangkat organisasi pemerintah daerah yang hadir dalam kesempatan itu bisa memberikan aspirasinya.

"Silahkan, sarana itu kita gunakan sebaik-baiknya," pinta Utami.

Acara Workshop Pendidikan Politik bertemakan Strategi Mewujudkan Pemilu tahun 2024 ini juga dihadiri oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY Moch Zainuri Ikhsan, Komisioner Bawaslu DIY Agus M Uhamad Yasin.

Lalu Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Doni Setiawan dengan dimoderatori oleh Mantri Kemantren Umbulharjo Rajwan Taufik. (nei)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005